



EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

*The Effectiveness of Education Budget Allocation in Improving the Quality of Education in
Barat Aceh District*

^{1*)}Devi Aliva, ^{2*)}Fadhil Ilhamsyah,

^{1,2,*)}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Teuku Umar, Aceh

Email: ¹⁾devialiva0@gmail.com, ²⁾fadhil.ilhamsyah@utu.ac.id

*Correspondence: devialiva0@gmail.com

DOI:

10.xxxx

History Artikel:

Diajukan:
05/11/2021

Diterima:
06/12/2021

Diterbitkan:
29/12/2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bappeda di kabupaten Aceh Barat. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di kabupaten Aceh Barat sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan hasil yang didapatkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran tepat waktu di awal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan sudah tepat sasaran. Aspek pengawasan sudah terbentuk baik dari pihak komite sekolah dan dinas terkait secara berkala.

Kata kunci: anggaran; pendidikan; efektivitas

ABSTRACT

Archives are defined as institutions that carry out all activities related to the This study aims to describe the Effectiveness of Education Budget Allocation in Improving the Quality of Education in West Aceh Regency. This research was conducted at the Bappeda Office in West Aceh Regency. Data were collected by interview, questionnaire, and documentation methods, which were then analyzed by quantitative descriptive analysis. The results of the research show that the level of Effectiveness of Education Budget Allocation in Improving the Quality of Education in West Aceh Regency has been carried out by applicable laws and regulations. Where based on the results obtained The results showed that the distribution was on time at the beginning of the fiscal year, based on the priority scale of school needs, and involved committees and teachers. The implementation aspect is right on target. The aspect of supervision has been formed from both the school committee and related agencies regularly.

Keywords: budget; educational; effectiveness

PENDAHULUAN

Sarana pendidikan bagi bangsa memegang peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, berkualitas, kreatif dan inovatif serta memiliki sikap (sikap dan perilaku) yang positif. Seperti yang dikatakan Suparno Erman dalam (Lutfi & Fathani, 2013), kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk menjadi aktor pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang terkena dampak (Akilah, 2019).

Berkaitan dengan fungsi tersebut, berjalannya sistem pendidikan tidak lepas dari perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan maupun sistem politik dalam bernegara (Adiwilaga, Alfian, & Rusdia, 2018). Pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai saat ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan dengan sistematis, programatis, dan berjenjang (Ningrum, 2016).

Berdasarkan konteks inilah pendidikan terasa semakin dituntut perannya, khususnya untuk dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan sehat jiwanya (Prasetyo, 2018). Bahkan yang paling membanggakan adalah pendidikan dimanifestasikan sebagai senjata pamungkas untuk memberantas kemiskinan, sejauh apa yang diperoleh peserta anak didik itu relevan dengan kebutuhan hidup mereka (Siregar, 2013). Oleh karena itu Pendidikan nasional harus dilaksanakan secara merata, adil, relevan, berkualitas dan efisien bagi seluruh rakyat sampai ke daerah pelosok tanah air.

Berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini, maka era globalisasi sekarang ini dimana situasi dan kondisi kehidupan yang semakin kompetitif, sangat dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup. Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan globalisasi dan ketenagakerjaan (Mustari & Rahman, 2014). Dimana dalam proses untuk mewujudkan masyarakat mempunyai keahlian, maka pilihannya adalah harus melakukan reformasi di bidang pendidikan yang lebih difokuskan pada penciptaan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan *fleksibel*, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam bekerja. Kita ketahui bahwa *output* dan *outcome* pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas pula. Maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut sangat tepat apabila kebijakan pembangunan daerah, diarahkan pada upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah benar-benar mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan, kita akan melihat derajat keterpaduan antara perencanaan program dan pelaksanaannya. Yang konkret adalah keterpaduan antara perencanaan pendidikan selama 5 (lima) tahun, dengan program yang dilaksanakan setiap tahun dengan dana APBD.

Jangka waktu 5 (lima) tahun yang penulis maksudkan adalah 2018, Kewajiban memberikan pelayanan dan memberikan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah selaku penyelenggara Negara. Karena negara secara konstitusional berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan pemerintah berkewajiban membiayainya, serta mewajibkan negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dua puluh persen (20%) dari anggaran pendidikan secara eksplisit ditetapkan oleh undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 29, mengatur bahwa dana pendidikan 20 ri APBN dan APBD tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Struktur anggarannya 26% untuk daerah, 26% untuk subsidi, jika 20% untuk kesehatan, maka untuk sektor lainnya (infrastruktur, pertanian, pertahanan dan keamanan, dll) menjadi 18%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena konstitusi (UUD) tidak menyebutkan persentase nominal anggaran kesehatan, sehingga jika dimasukkan ke dalam pembahasan MK, posisi UU Kesehatan menjadi sulit karena sejalan dengan APBN.

Pada sisi yang lain, pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, adalah bertujuan agar pemerintah dalam memberikan pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan semakin efektif dan efisien. Sistem penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif. Selain faktor-faktor tersebut, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Keterkaitan tingkat pendidikan dan pembangunan manusia sangat besar karena pendidikan dan kesehatan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu, kesehatan dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh kemakmuran. Pendapatan masyarakat maksimum tercapai saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Semakin meningkatnya tingkat pengangguran akan semakin mengurangi pendapatan masyarakat yang berakibat naiknya tingkat kemiskinan.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang terletak diujung Utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling Barat di Indonesia. Provinsi dengan sebutan Serambi Mekah ini, memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya keresidenan Aceh sebagai Provinsi yang bersifat Otonom berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom. Aceh dikenal kaya akan sumber daya alam baik itu berupa tambang maupun non tambang, potensi ini merupakan suatu modal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sektor Pendidikan tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka IPM yang terus meningkat sejak tahun 2012 hingga 2018. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ketahun tentu tidak terlepas dari hasil program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Aceh yang menargetkan pembangunan manusia Aceh dari berbagai segi secara merata. ([Novitasari & Hapitri, 2019](#)).

Kondisi pendidikan di Kabupaten Aceh Barat kian membaik terlihat dari beberapa indikator, diantaranya angka partisipasi pendidikan. Dengan telah tercapainya beberapa kemajuan dari pembangunan pendidikan di Aceh Barat, harapannya dapat menciptakan sumber daya manusia unggul sehingga output yang dihasilkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompetitif. Untuk mengejar target tersebut, berbagai langkah perbaikan baik fisik maupun non fisik, seperti sumber daya manusia terus ditingkatkan. Selanjutnya berdasarkan sumber BPS Aceh Barat tahun 2019 penyaluran

dana untuk pendidikan, hanya memiliki pendapatan untuk operasionalnya melalui dana BOS yang bersumber dari APBN ([Rangkuti](#), 2019).

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal ([Syahril, Idris, & Nurlela](#), 2017).

Investasi di bidang pendidikan mutlak diperlukan, sehingga pemerintah harus mampu membangun sistem dan fasilitas pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan di bidang pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan prasarana pendidikan dan penyediaan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-VI/2008. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan suatu kajian ilmiah dengan judul “*Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di kabupaten Aceh Barat*”.

METODE

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif atau bisa disebut metode Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan suatu situasi, fenomena, kondisi, peristiwa dan tujuan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut ([Fitrah](#), 2018) menjelaskan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penggalan yang menggambarkan suatu objek, fenomena atau lingkungan sosial seperti yang digambarkan dalam tulisan naratif, data dan fakta dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar. Jadi, ketika menulis laporan penelitian kualitatif, memuat petikan data atau fakta yang terungkap di lapangan untuk mendukung apa yang sedang diselidiki di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghasilkan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti dari sudut pandang yang komprehensif, komprehensif dan holistik. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah, gejala dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, menurut jenis penelitiannya, penelitian ini dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: 1) jenis penelitian berdasarkan tujuan, yaitu penelitian deskriptif; 2) jenis penelitian berdasarkan manfaat, yaitu penelitian murni; 3) jenis penelitian time-based, yaitu penelitian *cross sectional* yang dilaksanakan pada bulan Mei 2021.

Selanjutnya dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai sumber sebagai data primer. dalam penelitian ini. Spesialis dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda Aceh Barat. Selanjutnya, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung hasil analisis dalam tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep efisiensi harus selalu dikaitkan dengan efektivitas. Karena dari segi ekonomi, efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas erat kaitannya dengan pencapaian tujuan dalam kaitannya dengan tingginya harga. Dalam dunia pendidikan, efisiensi dan efektivitas cenderung ditandai dengan pola distribusi dan penggunaan sumber daya pendidikan yang

telah tertata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien harus mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan sumber daya pendidikan serta mampu mencapai tujuannya tanpa menemui kendala yang berarti. Efisiensi berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, hasil yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengalokasian anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat telah tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan hasil yang diperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran tepat waktu pada awal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, komite dan guru yang terlibat. Aspek implementasi tepat sasaran. Aspek supervisi secara berkala dilatih oleh dewan sekolah dan instansi terkait. Kegiatan evaluasi oleh panitia sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Laporan pengelolaan dapat dikatakan berhasil karena laporan dibuat sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana menurut Permendiknas No. 8 Tahun 2017. Tingkat efektivitas pengelolaan dana pendidikan telah mencapai 63%, dalam batas yang ada saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa: tingkat efektivitas anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan hasil yang diperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran tepat waktu pada awal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, komite dan guru yang terlibat. Aspek implementasi tepat sasaran. Aspek supervisi secara berkala dilatih oleh dewan sekolah dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Rusdia, Ujud. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Akilah, Fahmiah. (2019). Manajemen Perencanaan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan: Manifestasi dan Implementasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 81–94. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.156>.
- Fitrah, Muh. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Lutfi, Mustafa, & Fathani, Abdul Halim. (2013). *Hitam Putih Pendidikan: Menyingkap Realitas, Merajut Solusi*. Universitas Brawijaya Press.
- Mustari, Muhamad, & Rahman, M. Taufiq. (2014). *Manajemen pendidikan*. Jakarta: RajaGrafiika Persada.
- Ningrum, Epon. (2016). Pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681>.
- Novitasari, Yuli, & Hapitri, Dila. (2019). Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan, serta Pengaruhnya terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(1), 1–15.
- Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso. (2018). Peranan Perilaku Organisasi dan Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Produktivitas Output Pendidikan. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(1), 80–101. <https://doi.org/10.47766/idadrah.v2i1.267>.
- Rangkuti, Shihabuddin Fuady. (2019). *Evaluasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi untuk Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Di Indonesia*.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. (2013). Persepsi orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 11–27. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.548>.
- Syahril, S., Idris, Iswandi, & Nurlela, N. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah Produk Unggulan Kabupaten Aceh Tengah. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zqtnj>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).